

Ringkasan Kebijakan

Penguatan Kredibilitas Anggaran Air Minum, Sanitasi, dan Pengelolaan Sampah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ringkasan Ekskutif

Analisis kredibilitas anggaran sektor *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan kinerja yang tergolong baik dengan tingkat deviasi rata-rata 9,5% selama periode 2019-2023, memenuhi standar "good practice" PEFA (*Public Expenditure and Financial Accountability*). Namun, terdapat disparitas signifikan antar-bidang: sanitasi (11,6%) dan air minum (11,3%) berada pada kategori "basic minimum standard", sementara persampahan (9,5%) mencapai kategori "good practice".

Meskipun kredibilitas anggaran secara agregat baik, alokasi anggaran WASH yang sangat terbatas—hanya 0,64% dari APBD tahun 2023 (Rp 36,5 miliar)—menjadi tantangan utama dalam mempercepat pemenuhan akses universal. Provinsi NTB masih menghadapi kesenjangan: hanya 83,12% rumah tangga memiliki akses air minum layak (2023), dan cakupan penanganan sampah baru mencapai 49,64% dari target 70%.

Rekomendasi strategis mencakup: (1) peningkatan alokasi anggaran WASH secara progresif menuju 3% APBD; (2) penguatan koordinasi antar-kabupaten/kota untuk pengelolaan WASH regional; (3) perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran; dan (4) optimalisasi inovasi daerah dalam tata kelola WASH.

Konteks dan Temuan Kunci

Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan visi pembangunan jangka menengah "Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia" dengan tiga prioritas utama: (1) pengentasan kemiskinan, (2) penguatan ketahanan pangan melalui industri agromaritim, dan (3) menjadikan NTB destinasi wisata berkelas dunia. Visi ini merupakan tahap pertama implementasi RPJPD 2025-2045 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi menuju NTB

yang memiliki Ekonomi Maju, Sumber Daya Manusia Kuat, Aman Berkelanjutan lingkungannya, serta Sejahtera masyarakatnya.

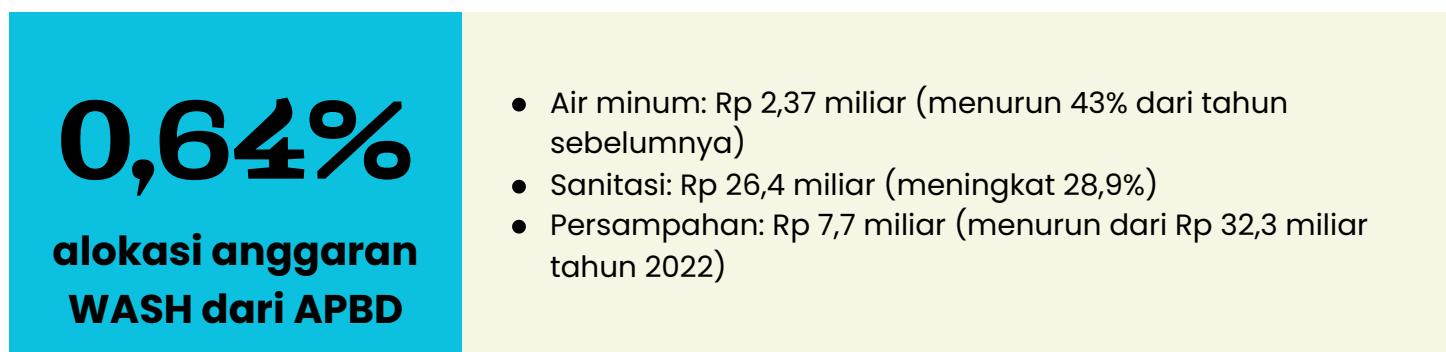
Pemenuhan akses universal WASH merupakan prasyarat fundamental bagi pencapaian ketiga prioritas utama daerah. Pertama, akses air bersih dan sanitasi layak mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin untuk kesehatan dan meningkatkan produktivitas ekonomi—krusial bagi pengentasan kemiskinan di 336 desa kantong kemiskinan dan 106 desa kantong kemiskinan ekstrem (tingkat kemiskinan 11,91% September 2024, kemiskinan ekstrem 2,04% Maret 2024). Kedua, ketersediaan air bersih merupakan input kritis bagi hilirisasi komoditas pertanian, peternakan, dan kelautan perikanan dalam program unggulan NTB Agromaritim dan Desa Berdaya. Ketiga, kebersihan dan sanitasi merupakan indikator kualitas destinasi wisata untuk mendukung program NTB Pariwisata Berkualitas.

Pembangunan sektor WASH secara langsung mendukung pencapaian Misi 1 RPJMD (Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif) melalui peningkatan derajat kesehatan, dan Misi 5 (Memperkuat Sistem Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan) melalui program NTB Lestari Berkelanjutan, khususnya target peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari 73,18 (2024) menjadi 77,62 (2029).

Meskipun NTB menunjukkan capaian positif dengan 83,12% rumah tangga memiliki akses air minum layak dan 100% Desa ODF sejak 2022, provinsi menghadapi tantangan struktural: (1) Indeks Kapasitas Fiskal 1,241 (kategori "sangat rendah") dengan ketergantungan dana transfer 60,4%, (2) alokasi WASH yang sangat terbatas (0,64% APBD 2023 atau Rp 36,5 miliar), (3) kesenjangan kewilayahan di kawasan pesisir dan perdesaan yang menjadi kantong penduduk miskin ekstrem, dan (4) kebutuhan investasi besar untuk mencapai akses universal.

Penguatan kredibilitas anggaran WASH bukan sekadar isu teknis pengelolaan keuangan, melainkan instrumen strategis untuk memastikan komitmen pembangunan dalam RPJMD 2025-2029 dapat direalisasikan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan—sejalan dengan program unggulan NTB Good & Smart Governance—mendukung spirit "Bangkit Bersama" menuju kemakmuran yang merata.

Temuan Kunci



- Deviasi agregat: 9,5% (kategori "baik")
- Deviasi per bidang:
 - Air minum: 11,3% (kategori C – standar minimum dasar)
 - Persampahan: 9,5% (kategori B – baik)
 - Sanitasi: 11,6% (kategori C – standar minimum dasar)

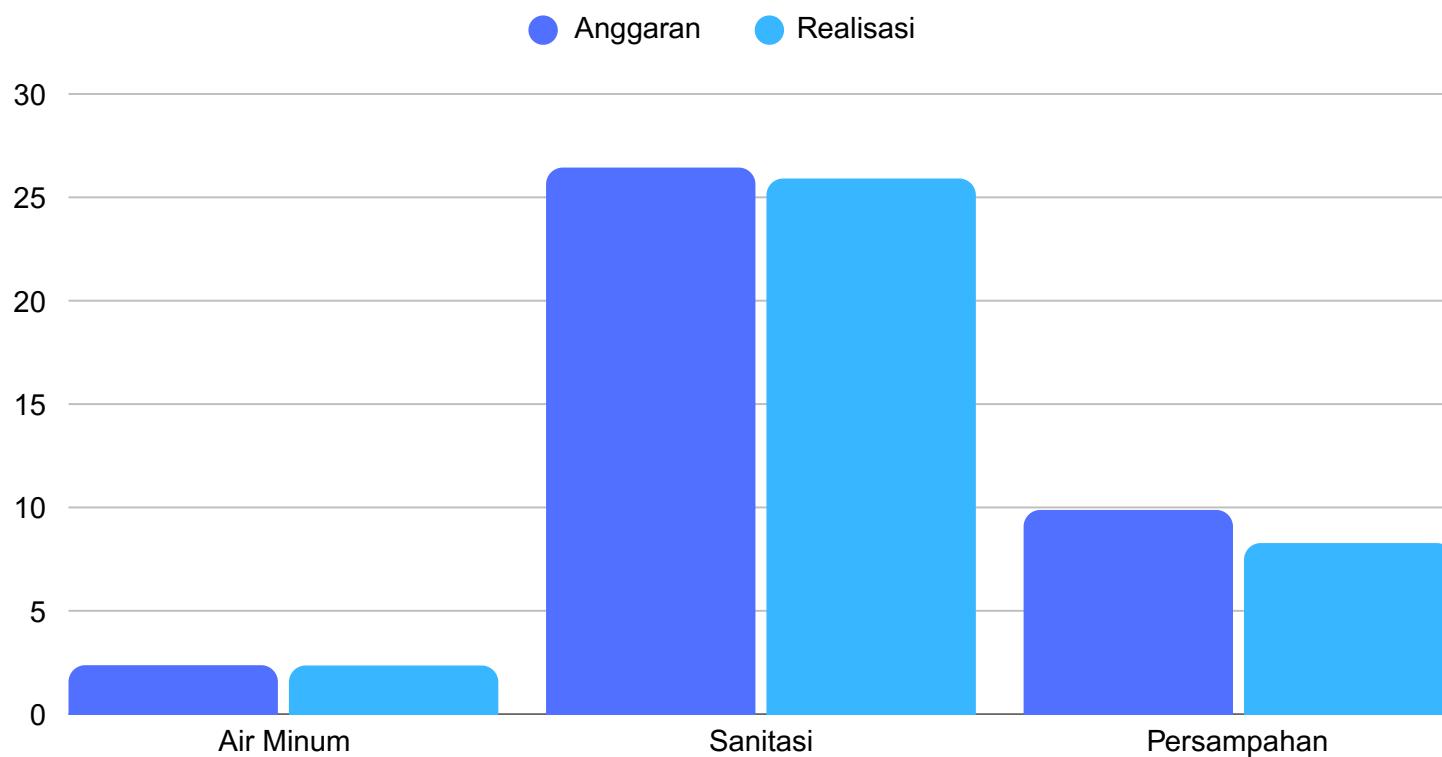
9,5%

Deviasi agregat (*Good practice*)

Faktor Penyebab Rendahnya Serapan

1. Faktor Teknis Perencanaan: Kelengkapan administrasi proposal bantuan tidak memadai (khususnya program pokir DPRD), keterlambatan regulasi teknis dari pemerintah pusat, keterlambatan penerbitan SK Kawasan Kumuh
2. Faktor Kelembagaan: Koordinasi antar-OPD dan antar-tingkat pemerintahan belum optimal, kapasitas SDM pelaksana terbatas, sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program belum efektif.

Grafik. Alokasi dan Realisasi Anggaran Air Minum, Sanitasi dan Persampahan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 (dalam miliar)



Sumber: APBD NTB 2023, diolah.

Capaian Kinerja dan Layanan

Capaian Positif:

- Akses air minum: 83,12% (2023), melampaui target 80,59%
- Sanitasi layak: 83,12% (2023), melampaui target 82,46%
- Desa ODF: 100% (sejak 2022)

Tantangan Berkelanjutan:

- Target Zero Waste 2023 tidak tercapai: Penanganan sampah 49,64% vs target 70%; Pengurangan sampah 15,65% vs target 30%
- Keterbatasan layanan di kawasan pesisir dan perdesaan
- TPS-3R yang dihibahkan ke masyarakat tidak beroperasi secara berkelanjutan

Kondisi Kawasan Pesisir Jerowaru (Audit Sosial KPPI Lombok Timur, 2024):

- 30% rumah tangga tanpa akses sanitasi layak
- 54% rumah tangga membeli air eceran (beban Rp 150.000-250.000/minggu)
- 43% rumah tangga membuang sampah ke sungai/laut
- Tingginya prevalensi penyakit berbasis lingkungan (diare, ISPA, penyakit kulit)

Rekomendasi

- Meningkatkan alokasi anggaran WASH menjadi minimal 3% dari APBD secara bertahap dan diversifikasi sumber pendanaan, yang dialokasikan khususnya untuk pengelolaan sampah di kawasan pesisir.
- Rebalancing Komposisi Belanja dengan meningkatkan porsi belanja modal dari 14,2% menjadi minimal 40% untuk pembangunan infrastruktur baru dan mengalokasikan dana pemeliharaan yang memadai.
- Menetapkan lokasi prioritas WASH di desa dengan angka stunting tinggi, mengintegrasikan program WASH dengan intervensi sensitif lainnya, dan melakukan monitoring dampak program WASH terhadap indikator kesehatan.
- BPKAD melakukan penandaan (tagging) anggaran WASH sejak tahap perencanaan untuk memastikan ketersediaan dana, membantu pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian.
- Memperkuat sistem tata kelola dan koordinasi lintas-OPD serta lintas-tingkat pemerintahan dalam pengelolaan sektor WASH melalui monitoring dan evaluasi berkala.
- Meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program WASH.

Hubungi Kami

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di fitrantb@gmail.com.

Perkumpulan FITRA Provinsi Nusa Tenggara Barat

Alamat: Jalan Pagesangan Indah XV No. 4, Pagesangan, Mataram, Lombok, Indonesia

Telepon: 0853-3881-1110

Situs web: www.fitrantb.org